

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/115/VII/2020/JBR/RES SMD, yang dilaporkan seorang Lelaki bernama Haris Riswandi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 jam 10.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dengan nama Nina Hayati. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terhadap Wawan Setiawan yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dapat diterapkan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Sumedang. Korban dan tersangka merupakan sepasang kekasih yang sama-sama masih dibawah umur. Pada saat kasus terjadi, korban berusia 15 belas tahun dan tersangka berusia 17 tahun. Tersangka telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Keluarga dari pihak korban akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang dialami oleh korban, setelah keluarga dari pihak korban mengetahui bahwa tersangka telah melakukan tindak asusila terhadap korban.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penyidik polres Sumedang dapat mengambil tindakan hukum untuk menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman maksimal, dalam hal ini Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 15 tahun. Namun penyidik juga harus mempertimbangkan diversi mengingat pelaku masih merupakan anak di bawah umur.

ABSTRACT

The background of this research is based on the Police Report number: LP / B / 115 / VII / 2020 / JBR / RES SMD, which was reported by a man named Haris Riswandi on Thursday, 9 July 2020 at 10.30 WIB, there was an alleged criminal act of decency against children in underage under the name Nina Hayati. The problem in this research is whether Wawan Setiawan who is suspected of committing a crime of decency against minors can be applied Article 81 paragraph 2 of Law no. 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning child protection and other legal actions that can be taken by Sumedang Police investigators. Victim and suspected was a lover which both of them is still underage. When the case happen, both of them was 15 and 17 years old. The suspect was doing a crime of decency against minors about 3 times with different times and place. After the family from the victim know what happen to her, they report the case to the police and the suspected one was arrested for further research.

The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: problem background, case position, examination of related documents, complete with theoretical basis, provision of legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this research can be concluded as follows: based on the descriptions in this legal memorandum, Sumedang police investigators can take legal action to ensnare the suspect with an article that carries a maximum penalty, in this case Article 81 paragraph (2) Law Number 17 Tahun. 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 with a maximum threat of imprisonment for 15 years. However, investigators must also consider the diversion of placing the perpetrator as a minor.